

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA  
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN  
KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
(Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir)**

**Nurul Fathia, Amries Rusli Tanjung & Novita Indrawati**

**Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau  
E-mail: n.fathia@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*Financial statement is a structural presentation from financial position and financial performance of the entity. The purpose of financial statement is to give information about financial position, financial performance and entity cash flow to give benefits for the user of financial statement. This study has several objectives: first, to examine the role of internal control system in financial statement quality. Second, to examine the role of information technology utilization in financial statement quality. Third, to examine the role of human resources competency in the financial statement quality and the effect of organizational commitment as variable moderation. Data is obtained from the questionnaires from 115 respondent from 25 OPD in Kabupaten Rokan Hilir . Using SPSS 21 the results of this study show that internal control system, information technology utilization and human resources competency has an influence on financial statement quality. The results of this study confirm commitment organization only effected relationship between internal control system with financial statement quality.*

**Keyword** : *Financial statement quality, internal control system, information technology utilization, human resources competency, commitment organization*

**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya. Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas keuangan yang didalam laporan keuangannya memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan adalah apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Kemudian Andal adalah apabila informasi yang disajikan pada laporan keuangan itu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Selanjutnya, dapat dibandingkan adalah laporan keuangan yang disajikan itu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dan yang terakhir dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta dan istilah dengan batas pemahaman para pengguna (PP 71 Tahun 2010).

Fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari informasi yang di dapat dari BPK Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Salah satu faktor yang dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yaitu Sistem Pengendalian Internal. Sistem pengendalian intern pemerintah, selanjutnya disebut SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. SPIP akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel.

Hal selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi Informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak komputer). Menurut Williams dan Sawyer (2003), bahwa pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Ariani, 2013).

Selanjutnya variabel moderasi adalah Komitmen Organisasi, Darma (2004) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat kekuatan identifikasi individu, dan keterikatan individu kepada organisasi yang memiliki ketiga karakteristik. Pertama, memiliki kepercayaan yang kuat dan menerima nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Kedua, kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi. Ketiga, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Identifikasi dimaksud adalah pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi. Keterikatan dimaksudkan adalah perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau

perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan adalah menyenangkan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu penerapan system pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun faktor-faktor tersebut dapat lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila diperkuat dengan variabel moderasi, yaitu komitmen organisasi, faktor-faktor tersebut dapat menjadi lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila, seorang aparat pemerintah yang punya komitmen terhadap organisasinya untuk lebih memajukan dan meningkatkan kinerja dari organisasi atau instansi tempatnya berasal, akan memulai dari peningkatan kinerja per masing-masing aparat tersebut, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut dapat lebih bermanfaat, berguna, serta menjadikan laporan keuangan lebih berkualitas.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan ini semakin banyak dilakukan oleh peneliti akuntansi (misal Ihsanti, 2014; Fikri, 2015; Ayu, 2016; Sanjaya, 2017; Edlin, 2018) namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014), penelitian ini menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Dan tujuan lainnya adalah untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga ke depan dapat memperoleh opini WTP berarti opini tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengembalian keputusan oleh para pemaku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, sistem pengendalian intern (SPI) yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2012). Dari uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

#### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan

teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dari uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintahan. kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan Pemda. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi.**

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub> : Komitmen Organisasi memperkuat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi.**

Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk membantu mempercepat proses dalam penyajian laporan keuangan agar tepat waktu. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran untuk menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi agar penyajian laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas. Hal ini menunjukkan semakin tinggi Komitmen

Organisasi, maka semakin tinggi pula Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H<sub>5</sub> : Komitmen Organisasi memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan dimoderasi oleh Komitmen Organisasi.**

Sumber daya manusia merupakan elemen terpenting dalam suatu organisasi, oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya dan akan mendorong terwujudnya laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) yang berkualitas. Namun Sebaliknya, komitmen pegawai yang rendah cenderung mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja dan akan memperlemah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan. Jadi dapat disimpulkan hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H<sub>6</sub> : Komitmen Organisasi memperkuat Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 OPD berupa Dinas dan Badan di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi, sampel dalam penelitian ini diambil dari setiap OPD 5 responden yaitu Kasubag Keuangan, Bendahara, dan tiga orang Staf Akuntansi. Dari syarat tersebut didapat sampel 125 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung kepada dinas-dinas terkait.

### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* dengan bantuan SPSS vers 21. Sebelum analisis regresi dilakukan, uji kualitas data dan uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan apakah model regresi sudah memenuhi asumsi valid, reliabel, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Uji Kualitas Data**

#### **Uji Validitas**

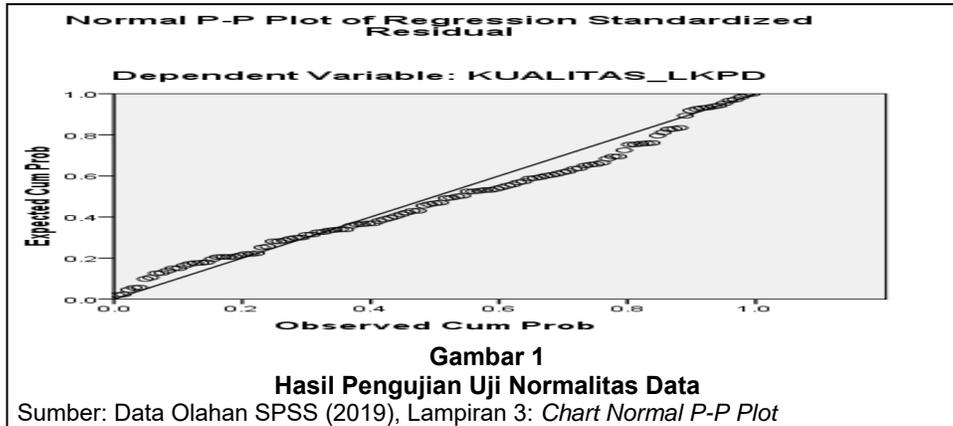
Berdasarkan hasil uji validitas, dapat dilihat bahwa variabel kualitas laporan keuangan daerah dengan 8 item pertanyaan, sistem pengendalian internal dengan 10 item pertanyaan, pemanfaatan teknologi informasi dengan 6 item pertanyaan, kompetensi sumber daya manusia dengan 8 item pertanyaan dan komitmen organisasi dengan 12 item pertanyaan sudah memiliki nilai pada item pertanyaan diatas 0,183 berarti memenuhi syarat valid.

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat dilihat bahwa variabel kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi sudah memiliki nilai koefisien alfa diatas 0,60 berarti variabel yang digunakan sudah konsisten dan dapat dipercaya.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas



Dari gambar plot dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Multikolinearitas

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SPI	.185	5.420
PEMANFAATAN TI	.207	4.820
KOMPETENSI SDM	.142	7.034
KOMITMEN ORGANISASI	.188	5.308

Sumber: Data Olahan SPSS (2019), Lampiran 3 : *Coefficients<sup>a</sup>*

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel-variabel independen yang diteliti.

#### Uji Autokorelasi

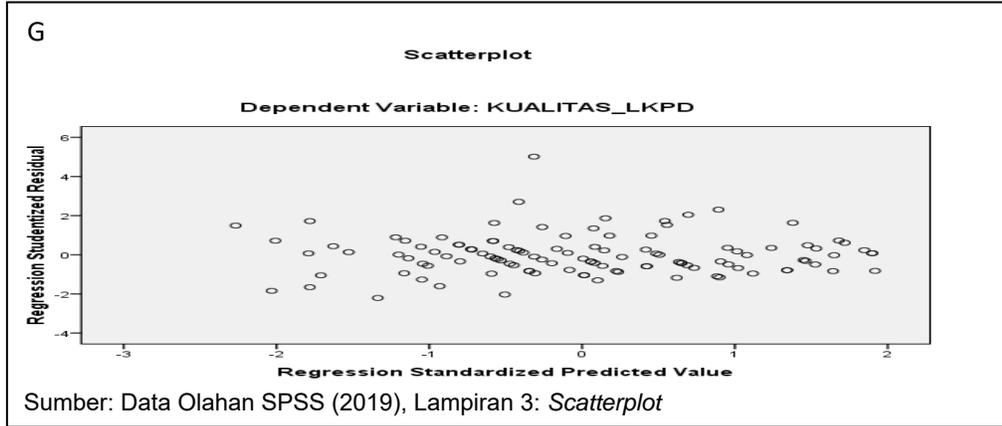
**Tabel 2**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

MODEL	Durbin-Watson
1	1.551

Sumber: Data Olahan SPSS (2019)

Dari tabel 2 di atas dihasilkan nilai DW untuk ketiga variabel independen adalah 1,491 yang berarti nilai DW berada sekitar 2, maka dapat dikatakan tidak ada korelasi, kalau besarnya mendekati 0, maka terdapat autokorelasi positif dan jika besarnya mendekati 4, maka terdapat autokorelasi negatif, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam data pengamatan penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas



**Gambar 2**  
**Uji Heterokedastisitas**

Dari Gambar 2 *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik- titik menyebar secara acak, serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

**Hasil Uji Regresi Berganda**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Model Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
SPI	.352	.056	.426	6.267	.000
PEMANFAATAN TI	.202	.085	.164	2.377	.019
KOMPETENSI SDM	.341	.066	.396	5.174	.000

Sumber : Data Olahan SPSS (2019)

Dari tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:  
**KUALITAS\_LKPD = 2.355 + 0.352SPI + 0.202PEMANFAATAN\_TI + 0.341KOMPETENSI\_SDM + e**

Sementara untuk uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,890. Artinya adalah bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel sebesar 89 %. Sedangkan sisanya 11 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

## Hasil Uji *Multiple Regression Analysis* (MRA)

**Tabel 4**  
**Hasil Uji *Multiple Regression Analysis* (MRA)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
SPIxKOMITMEN	.006	.001	.718	5.608	.000
TIXKOMITMEN	.004	.008	.291	.501	.617
SDMXKOMITMEN	.003	.006	.251	.455	.650

Sumber : Data Olahan SPSS (2019)

## Pembahasan

### Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 3 memperlihatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,267 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,981 dan  $p$  value (*sign*) 0,000, dimana nilai ini signifikan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai *sig.* lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan **H<sub>1</sub> diterima**. Artinya, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pada penelitian Susilawati (2012), Widyaningsih (2016), Mardinan (2018) melakukan penelitian pada OPD di kota bandung, Nurillah (2014) melakukan penelitian di Kota Depok, Novalia (2015) melakukan penelitian di Kota Surakarta, Ahli Fikri (2015) melakukan penelitian di Kota Malang, Nur (2015) melakukan penelitian di Sumatra Selatan, Ayu (2016) melakukan penelitian di Kabupaten Badung, Bali, Sanjaya (2017) melakukan penelitian di kabupaten kampar provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pengertian pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kenadalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi,2013). Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern menjadi patokan awal apabila ditemukannya adanya temuan dalam laporan keuangan, sehingga peran dari sistem pengendalian intern dituntut untuk bekerja secara objektif dan independen untuk menghindari hal-hal yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan daerah tersebut.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Tabel 3 memperlihatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,377 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,981 dan  $p$  *value (sign)* 0,019, dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai *sig.* lebih kecil dari 0,05, maka **H<sub>2</sub> diterima**. Artinya, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Nurillah (2014) melakukan penelitian pada OPD di kota Depok dan Stefani Marina Palimbong (2018) melakukan penelitian pada skpd di kota padang yang menunjukkan hasil Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berbeda halnya dengan penelitian Riedy Riandani (2017) melakukan penelitian pada kabupaten limapuluh kota. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah masih mengalami hambatan karena peralatan dan software pendukung yang masih sering mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama dan berdampak pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami penyesuaian atau mengalami kemunduran dan ini berimplikasi pada ketidaktepatan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai karakteristik kualitatif laporan keuangan itu sendiri.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al. 2000)

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat yang akan mengakibatkan kualitas dari laporan keuangan daerah yang bersangkutan akan meningkat.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Tabel 3 memperlihatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,174 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,981 dan  $p$  *value (sign)* 0,000, dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.05 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai *sig.* lebih kecil dari 0,05, maka **H<sub>3</sub> diterima**. Artinya, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pada penelitian Emilda Ihsanti (2014) pada Kab. Lima puluh, Irma Novalia (2015) pada skpd kota surakarta, Dzulfikar Ahli Fikri (2015) melakukan penelitian pada skpd di Kota Malang, Ida Ayu (2016) melakukan penelitian pada kabupaten Badung, Aditya Sanjaya (2017) melakukan penelitian pada skpd kabupaten Kampar, Gusti Siwambudi (2017) melakukan penelitian di Kabupaten Klungkung, Synthia (2017) melakukan penelitian di SKPD Batam, menunjukkan bahwa hasil penelitian Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda halnya dengan penelitian Akhmad Syarifudin (2014) melakukan penelitian pada Pemerintahan kab Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Sutaryo (2011), SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintahan. Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA. Hal ini berarti dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh responden dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu pengalaman kerja, kemampuan kerja dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang pegawai pada SKPD juga bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Sutaryo, 2011).

#### **oPengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Setelah Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi**

Berdasarkan Tabel 4 memperlihatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,608 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,981 dan  $p\ value\ (sign)$  0,000, dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $sig.$  lebih kecil dari 0,05, maka **H<sub>4</sub> diterima**. Artinya, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah setelah dimoderasi oleh Komitmen Organisasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam upaya mendukung pengendalian intern pemerintah daerah dilakukan oleh beberapa institusi antara lain, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selanjutnya Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Berikutnya Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Sementara itu institusi pada tingkat kabupaten/kota adalah inspektorat Kabupaten/Kota yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen organisasi yang tinggi akan pentingnya pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, karena

semakin tingginya pengawasan akan meminimalisir kesalahan yang terjadi, seperti ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan atau kelemahan pengendalian intern yang dapat merusak citra laporan keuangan bahkan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi daerah yang bersangkutan.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Setelah Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi**

Tabel 4.14 memperlihatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,501 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,981 dan  $p$  value (*sign*) 0,617, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai *sig.* lebih besar dari 0,05, maka  **$H_5$  ditolak**. Artinya, Komitmen Organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadya Edlin (2018) melakukan penelitian di skpd Kota Dumai, Riau menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara konseptual jika seorang individu berkomitmen tinggi terhadap tujuan organisasi maka hal ini akan dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Komitmen organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan karena pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan dalam mengelola keuangan, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Sehingga ada atau pun tidak komitmen organisasi, pengelola keuangan pada Satker di lingkungan kerja dituntut menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Hal lain yang menyebabkan komitmen organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan adalah subjek komitmen organisasi adalah manusia, sementara pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu sistem informasi yang dapat ditingkatkan dengan pengembangan sistem informasi, sehingga sebegitu apapun komitmen organisasi, tidak akan bisa meningkatkan kinerja pemanfaatan teknologi informasi tanpa adanya perbaikan dan pengembangan pada sistem teknologi informasi yang digunakan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Setelah Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi**

Tabel 4 memperlihatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,455 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,981 dan  $p$  value (*sign*) 0,650, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai *sig.* lebih besar dari 0,05, maka  **$H_6$  ditolak**. Artinya, Komitmen Organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Edlin (2018) yang melakukan penelitian di skpd Kota Dumai, Riau yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda halnya dengan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Siwambudi (2017) menunjukkan bahwa

Komitmen Organisasi tidak berhasil memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Secara konseptual jika seorang individu berkomitmen tinggi terhadap tujuan organisasi maka hal ini akan dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu menggunakan kompetensinya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya jika seorang individu tidak memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya maka kompetensinya tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kontradiksi antara teori dengan hasil penelitian dapat dijelaskan dengan melihat penilaian responden terhadap masing-masing indikator komitmen organisasi. Berdasarkan nilai rata-rata indikator komitmen organisasi diketahui bahwa keterlibatan dengan organisasi memiliki rata-rata skor yang paling rendah dibandingkan dengan identifikasi dan loyalitas pegawai terhadap organisasinya. Rendahnya keterlibatan pegawai terhadap organisasinya kemungkinan disebabkan karena pegawai mendapat tekanan dari atasan yang menginginkan seluruh tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi dimana ia bekerja. Dengan kata lain, terdapat mekanisme pengendalian birokratis organisasi yang tidak sesuai dengan norma, etika dan kemandirian pegawai sebagai seorang profesional (Ihksan, 2011).

Interaksi antara komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas LKPD kemungkinan juga disebabkan karena kurangnya penghargaan (*reward*) bagi pegawai yang berprestasi, promosi jabatan tidak sesuai dengan ketentuan, penghasilan yang diterima tidak sesuai beban kerja, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif untuk menunjang pegawai dalam bekerja sehingga kemampuan yang dimiliki pegawai tidak digunakan secara maksimal.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Komitmen organisasi hanya berhasil memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo, 2013. "Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)". *Jurnal STIE Semarang*. Vol 5 No. 3, Edisi Oktober 2013.
- Ahli Fikri, Dzulfikar, 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.
- Amran, 2009, Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Ichsan Gorontalo*, Vol 4, No 2.

- Anugrah, Desiana, 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (1), 2014, 276-288
- Arens, Alvin A., 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Ariani, Andi Neno, 2013. Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pinrang Tahun 2001-2011. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ayu, Ida, 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.2. Agustus 2016
- Bastian, Indra, 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Botutihe, Tutun Hermawanto, 2013. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo", *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Dagong, Stevani I, 2013. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada DPPKAD Kota Gorontalo). *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
- Dharma, Surya, 2004. *Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Program Pascasarjana FISIP.
- Enho, Yohanes, 2008. "Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan", *Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam, 2013. *Moderated Regression Analysis (MRA)*.
- Halim, Abdul, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPPN, Yogyakarta
- Haty Ramadhan, Febria, 2018. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- I Gde Pitana, I Ketut Surya Diarta, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- I Gede Agus Yudianta, Ni Made Adi Erawati. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 8, No 02, ISSN: 2302-8556
- Ihsanti, Emilda, 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan SAKDaerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.
- Indriasari, Desi, dan Ertambang Nahartyo, 2008. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern

- Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, SNA, XI, Pontianak 23- 25 Juli 2008.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mangkunegara, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardinan, Trisdina, 2018. *Effect of Human Resources, Leadership Style, The Use of Information Technology and Internal Control on the Quality of Financial Statements (Study at Directorate General of Construction, Ministry of Works)*
- Marina Palimbong, Stefani, 2018. *The Effect Of Competence Of Human Resources And The Use Of Information Technology On The Quality Of Financial Report With Internal Control System And Organizational Commitment As Moderation Variable*.
- Mulyana, Deddy, 2009. *Ilmu komunikasi; Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nadya Edlin, Debby, 2018. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Opd Kota Dumai)*. JOM FEB, Volume 1 Edisi 1 (Januari – Juni 2018)
- Nasser, et. Al, 2006. " Auditor – Client Relationship : The Cose of Audit Tenure and Auditor Switching In Malaysia" . *Managerial Auditor Journal*, val. 21, No. 7, PP. 724-737.
- Nordiawan, Deddi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Novalia, Irma, 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Skpd Kota Surakarta)*
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No. 1 Vol. 13, April 2008, hal 48-58
- Nur, Nunuy, 2015. *The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City, And Provincial Government In South Sumatera*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 ( 2015 ) 811 – 818.
- Nurillah, 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)*
- Nurlela, Siti dan Rahmawati, 2010, *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di subosukawonosraten*. SNA XIII, Purwokerto.

- Ornstein, Allan C. & Francis P. Hunkins, 2009. *Curriculum, Foundations, Principles, and Issues*, Francis P. Hunkins: Pearson International Edition.
- Priyatno, Duwi, 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendaran*. Gaya Media, Yogyakarta.
- Rajana HRP, Junita Putri. 2009. Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar. *JOM. FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 15 Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Riandani, Riendy, 2017. *Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Sanjaya, Aditya, 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *JOM Fekon* Vol.4 No.1 (Februari) 2017
- Santoso, Singgih Santoso, 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik..* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma & Roger Bougie, 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Sixth Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Siwambudi, Gusti, 2017. Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6.1 (2017): 385-416.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013: 124. *Metode Teknik Total Sampling*
- Susilawati dan Dwi Seftihani Riana, 2014. "Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *STAR – Study & Accounting Research* | Vol XI, No. 1 – 2014: 15-32.
- Syahrida, Cut Faiza, 2011, "Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara". Universitas Sumatera Utara.
- Syarifudin, Akhmad, 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2014*
- Synthia, 2017. The Effect of Human Resources Competence and Application of Regional Financial Accounting Systems on Quality of Financial Report. *Journal of Applied Accounting and Taxation, Vol. 2, No. 1, March 2017, 68-74*
- Warisno, 2008, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi", *Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan*.
- Widyaningsih, Aristanti, 2016. Internal Control System on the Quality of Financial Statement Information and Financial Accountability in Primary Schools in Bandung, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online), Vol.7, No.10, 2016

Wijaya, Henryanto, 2008, Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Akuntansi / Tahun XII No. 3*, 313-323.

Wilkinson, Josep W. Et al, 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application, 4 Edition, John Willey & Sons Inc, New York-USA.*

### Internet Sources

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1) *tentang Sistem Akuntansi Keuangan.*

Hevesi, G. Alan, 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government.* [www.osc.state.ny.us](http://www.osc.state.ny.us)

Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan*– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia .2005. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Sutaryo, 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah dengan E-Goverment System.* <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id>

Wilkinson, Josep W. Et al, 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application, 4 Edition, John Willey & Sons Inc, New York-USA.*

<http://pekanbaru.bpk.go.id>

[www.rohilkab.go.id](http://www.rohilkab.go.id)